

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Hidayat Adibrata, *Bekerja Sebagai Pengacara*, Esensi, divisi Penerbit Erlangga, t.k., 2010.
- A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, Cetakan Kedua, 2005,
- Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, 2008.
- Artijo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII Press. Yogyakarta, 2010.
- A. Sukris Sarmadi, *"Advokat" Litigasi & Non Litigasi di Pengadilan*, Pustaka Prisma, Yogyakarta, Cetakan I, 2007.
- Beberapa Pakar Hukum Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum, Harsono (Editor), *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Binoto Nadapdap, *Menjajaki Seluk Beuk Honorarium Advokat*, Jala Permata, Jakarta, 2008.
- Binoto Nadapdap, *Menakar Besaran Honorarium Advokat*, Jala Permata, Jakarta, 2010.
- C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Cetakan pertama, 1994.
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.
- Gatot Supramono, *Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan (dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*, Djembatan, 2008.
- H. Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, Cetakan Ketiga, Maret, 2009.

- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Cetakan I, Maret 2010.
- H.P. Pangabean, *Buku Ajar Klinis Hukum dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, PT Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2011.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Press, Malang, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, 2005.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Cet.1, 2011.
- Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan; Pandangan Kritis Terhadap Penegakan hukum di Indonesia*, Galangpress, Yogyakarta, Cetakan I, 2007.
- J.J. Von Schimd, *Ahli-ahli Pikir tentang Negara dan Hukum*, diterjemahkan oleh R. Wiratno (et.al), Jakarta, PT. Pembangunan, 1980.
- Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1989.
- M. Daud Silalahi, *Metodologi Penelitian Hukum; Preferensi Khusus pada Pendekatan Multi/Interdisipliner*, Lawencon Binding Centre, Bandung, 2011.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, 2003.
- Minola Sebayang dan Achmad Soheh, *Kiat Cerdas Menjadi Pengacara Sukses*, Raih Asa Sukses, Depok, Cetakan I, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mohammad Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum*, Cetakan II, Malang: Luman Christi, 2000.
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Paingot Rambe Manalu, dkk, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, 2010.

- Rizkiyadi Darmowiyoto, *I Am A Lawyer*, Sunray Books, Jakarta, Cet.I, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Ke-1, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia (grasindo), Jakarta, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan kelima, 2001.
- Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan keempat, 2006.
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, dan Pusata Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Cetakan I, 2010.
- Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Jakarta, Cet.1, 2004.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, t.k., 2009.
- Yudha Pandu, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, Indonesia Legal Center Publishing, PT. Abadi, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia (TLNRI) No. 3209)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282).

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3714).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

C. Sumber Lain

Alfarisi, "Implementasi Ham Indonesia," <http://wap.myflexiland.com/blog_detail.php?idku=74109>, diakses: Jum'at, 12-3-10.

Anggara, "Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum", <<http://anggara.org/2006/06/14/dimensi-moral-profesi-Advokat-dan-pekerja-bantuan-hukum/>>.[Senin, 15-8-2011]

Anggara, "*Senior Researcher Associate*, "Organisasi Advokat dan Program Bantuan Hukum di Indonesia", <<http://icjr.or.id/2011/04/12/organisasi-Advokat-dan-program-bantuan-hukum-di-indonesia/>> [Senin, 15-8-11].

Anonymous, "HAM: Antara Teori Dan Realita," <<http://attafkir.multiply.com/journal/item/19>>, Diakse: Kamis, 11-3-10.

Anonymous, "Lembaga Bantuan Hukum", <<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/lembaga-hukum-Advokat.html>>[Selasa, 28-12-2010].

Anonymous, "Penegakan HAM: Jalan Tak Ada Ujung," <<http://yayasan-kksp.blogspot.com/2009/01/penegakan-ham-jalan-tak-ada-ujung.html>>, Diakses: [Kamis, 7-5-2010].

- Bagir Manan, "Peran Advokat Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa", *Artikel*, Majalah Hukum Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta Pusat, Tahun Ke XX No. 240 September 2005.
- Frans Hendra Winarta, "*Menggugat Peran Kalangan Advokat dalam Reformasi Hukum*", <http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=26>[10-6-2005].
- Humphrey R. Djemat, "*Sapu Bersih*" dan *Perilaku Advokat*," <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0505/19/nas10.html>.
- Mardjono Reksodipoetro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993.
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor Perkara 187/Pid.Sus/2012/PNBB.
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor Perkara 272/Pid.sus/2012/PNBB.
- Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor Perkara 261/Pid.B/2011/PN.Smd
- Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor Perkara 160/Pid.B/2011/PN.Smd
- Setiyono, "Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Dalam Kedudukannya Sebagai Officium Nobile (Suatu Kajian Konseptual Terhadap Peran Dan Fungsi Sosial Profesi Advokat Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)", <http://www.m2s-consulting.com/webs/index.php?option=com_content&view=article&id=27:kewajiban-pemberian-bantuan-hukum-oleh-Advokat-dalam-kedudukannya-sebagai-officium-nobile-&catid=38:law&Itemid=25>.[Senin, 15-8-2011].
- Suko Wiyono, "Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila," <<http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=25&Itemid=13>>, diakses: Jum'at, 12-3-10.
- Suyadi Muhammad, "Membaca Ulang Penegakan HAM," <http://batampos.co.id/Opini/Opini/Membaca_Ulang_Penegakan_HAM.html>, Diakses: Kamis, 30-4-2009.
- T. Gayus Lumbuun, *Immunitas Advokat dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia Sebagai Profesi yang Bebas dan Mandiri*, Makalah, Disampaikan pada Ulang Tahun Ikadin ke -20 & Diskusi Interaktif "Immunitas Advokat dalam Proses

Penegakan Hukum di Indonesia Sebagai Profesi yang Bebas dan Mandiri, DPC Ikadin-Bandung, 2005.

Wikipedia, "Hukum Indonesia", <http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Indonesia>[Senin, 20-12-2010].